

Pernyataan atau fakta secara umum bahwa kesadaran menulis di perguruan tinggi rendah, tidak berlaku di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) khususnya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, melalui program atau proyek "AyoMenulisFISIP".

Tulisan-tulisan mereka tidak hanya memiliki kualitas pemaparan fakta, data, permasalahan, pembahasaan, kesimpulan dan saran, namun juga memiliki "news peg" (cantelan peristiwa) atau aktual. Kalaupun kurang aktual tetap tersaji "ever green". Isu-isu, fenomena, persoalan apapun yang diangkat dalam tulisan-tulisan opini di koran akan memiliki makna tersendiri, selain tidak sekadar terdengar dan diketahui di lingkup kelas.

Dalam dinamika kehidupan yang kian kompleks, sumbangan ide, gagasan atau informasi dari kampus akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka. Semoga karya bermakna ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi siapa saja untuk melakukan hal yang sama.

Y.B. Margantoro

Redaktur Senior Harian "Bernas Jogja" dan Direktur LPJB

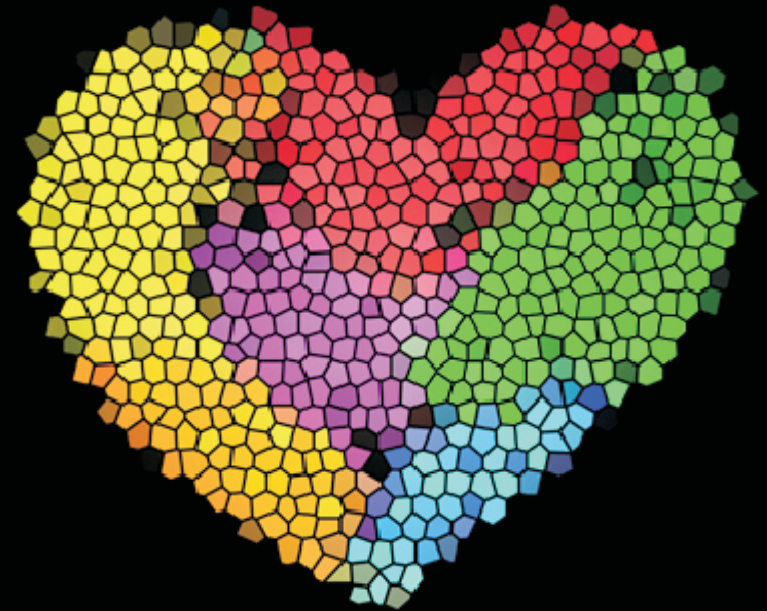


Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

ISBN: 000-000-00000-0-0



MOZAIK INDONESIA Catatan atas Fenomena Komunikasi, Politik, Sosial, dan Hukum di Indonesia



MOZAIK INDONESIA

**Catatan atas
Fenomena
Komunikasi, Politik,
Sosial, dan Hukum
di Indonesia**

Kata Pengantar:
Y.B. Margantoro



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Editor:
Lukas S. Ispandriano
Yohanes Widodo

MOZAIK INDONESIA

MOZAIK INDONESIA

Catatan atas Fenomena Komunikasi, Politik, Sosial, dan Hukum di Indonesia

Kata Pengantar:
Y.B. Margantoro

Editor:
Lukas S. Ispandriarno
Yohanes Widodo

Penerbit



**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

MOZAIK INDONESIA

© 2012

Penerbit:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari 6 Yogyakarta 55281
Telepon: (0274) 487711 ext. 4120
Website: <http://fisip.uajy.ac.id>

Editor:

Lukas S. Ispandriarno dan Yohanes Widodo

Tim Penulis:

Lukas Suryanto Ispandriarno, Yudi Perbawaningsih, MC. Ninik Sri Rejeki, Setio
Budi Hendro Hutomo, Bonaventura Satya Bharata, Donatus Danarka Sasangka,
Yohanes Widodo, Desideria Cempaka, Dhyah Ayu Retno Widyastuti, Lucinda,
Stefanus Nindito, Imma Indra Dewi Windajani

Desain dan Tata Letak

Johan de Mello

Cetakan pertama: Februari 2012

ISBN: 000-000-00000-000-0

Daftar Isi

iv	Daftar Isi
x	Kata Pengantar Y.B. Margantoro
xiii	Sekapur Sirih <i>Bagian Kesatu: PUBLIK RELATIONS</i>
2	Menyorot Praktik Humas Perusahaan Yudi Perbawaningsih
6	Amuk Buruh: Diversitas Kultural dan Kompetensi Komunikasi MC. Ninik Sri Rejeki
10	Strategi Pertahanan Citra SBY Yudi Perbawaningsih
	Bagian Kedua: IKLAN
16	Iklan Susu Formula vs Kampanye ASI Desideria Cempaka Wijaya Murti
21	Sepak Bola Indonesia dan Iklan Desideria Cempaka Wijaya Murti
25	Wisata Tani: Belajar dari Maori Desideria Cempaka Wijaya Murti

Bagian Ketiga: JURNALISME

- 30 Stop Berita Susno!**
Lukas Suryanto Ispandriarno
- 34 Gagalnya Nalar Jurnalistik Utilitarian**
Donatus Danarka Sasangka
- 38 Empati Media pada Peristiwa Bencana**
Bonaventura Satya Bharata
- 42 Mengapa “Operasi Patuh” Tak Boleh Diliput?**
Lukas Suryanto Ispandriarno
- 45 Pers dan Kejujuran Pejabat Publik**
Lukas Suryanto Ispandriarno
- 48 Korporasi Media dan Kepentingan Publik**
Bonaventura Satya Bharata
- 52 Media dan Popularitas Soeharto**
Bonaventura Satya Bharata

Bagian Keempat: POLITIK/KEBIJAKAN

- 58 E-Voting: Belajar dari Kabupaten Jembrana**
Yohanes Widodo

- 62 **DPR dan Opini Publik**
Yohanes Widodo
- 66 **Perjuangan Membentuk Komisi Informasi**
Lukas Suryanto Ispandriarno
- 70 **Bencana dan Pembelajaran Bangsa**
Setio Budi Hendro Hutomo
- 74 **Akses Informasi bagi Kualitas Perempuan
Pekerja Migran**
Dhyah Ayu Retno Widyastuti
- 80 **Email Komisi VIII DPR**
Yohanes Widodo
- 82 **Belajar “Bencana” dari Jepang**
Yohanes Widodo
- Bagian Kelima: SOSIAL*
- 87 **Konversi Gas: Kebijakan *Pro*-Rakyat yang
Mencelakakan Rakyat**
Lucinda
- 91 **Di Tengah Kepungan Bisnis Ritel**
Lucinda

- 95 **Skripsi, 'Mahkota' Mahasiswa?**
Yohanes Widodo
- 99 **Wacana Tubuh dalam Pornografi**
Stefanus Nindito
- 103 **Budaya Paksa dan Budaya Amuk**
Lucinda
- Bagian Keenam: HUKUM*
- 108 **Aksesibilitas Penyandang Cacat**
Imma Indra Dewi Windajani
- 112 **Kecelakaan Kereta Api**
Imma Indra Dewi Windajani
- 117 **Pekerja Kontrak**
Imma Indra Dewi Windajani

Kata Pengantar

Y. B. Margantoro

ADANYA mitos bahwa menulis perlu bakat, merasa “tidak” memiliki waktu karena kesibukan yang amat sangat, inspirasi atau ide yang tidak kunjung datang, sulit untuk memulai menulis, ragu-ragu, tidak percaya diri, beranggapan bahwa menulis tidak menguntungkan, dan lain-lain, menjadi hambatan banyak orang untuk menulis.

Menulis sebagai sarana mengungkapkan ide, gagasan, pemikiran, aspirasi, gugatan, informasi, pengetahuan, imajinasi, sampai pengalaman empiris merupakan keniscayaan. Masalahnya adalah tidak semua orang mau mulai membaca, berdialog, menjalani pengalaman empiris sampai berimajinasi ria. Maka ketika suatu saat harus memulai menulis, karena dorongan atau paksaan, hambatan itu pun muncul dan terus menjadi momok.

Membaca dan menulis semestinya menjadi “hak” dan “kewajiban” setiap insan. Apalagi civitas akademika sebuah lembaga pendidikan tinggi, membaca dan menulis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika intelektualitas dan tanggung jawab sosial. Namun apakah dinamika “satu paket” itu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi kalangan akademisi?

Direktur Penerbit Naufan Pustaka Deni Asy’ri dalam sebuah diskusi penulisan buku di sebuah perguruan tinggi swasta (PTS) di Yogyakarta, medio 2011, mengemukakan, budaya kesadaran menulis buku di lingkungan masyarakat kampus saat ini dinilai masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan minimnya jumlah terbitan buku di Indonesia saat ini.

Saat ini, Indonesia hanya menerbitkan sekitar 7.000 judul buku setiap tahun. Jumlah tersebut sangat jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang mampu menerbitkan 75.000 judul setiap tahun.

Menurut direktur penerbit buku itu, sebenarnya Indonesia memiliki potensi besar untuk menerbitkan karya-karya akademik seperti buku karena memiliki pangsa pasar yang luas. Kecilnya jumlah terbitan buku mengindikasikan masih rendahnya budaya menulis di lingkungan masyarakat kampus, khususnya menulis buku.

Namun pernyataan atau fakta secara umum bahwa kesadaran menulis di perguruan tinggi rendah, tidak berlaku di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) khususnya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Melalui program atau proyek “AyoMenulisFISIP” dosen-dosen fakultas itu dan didukung dosen fakultas hukum universitas yang sama paling tidak sejak 1,5 tahun silam secara rutin setiap Selasa menulis di koran khususnya Harian “Bernas Jogja”. Bahkan, kumpulan tulisan itu kemudian dibukukan dalam judul “Mozaik Indonesia : Catatan atas Fenomena Komunikasi, Jurnalisme, Hukum dan Sosial”.

Lepas dari konsentrasi studi FISIP (dan Fakultas Hukum) memang di bidang komunikasi, jurnalisme, hukum dan sosial, namun dalam kenyataan di lapangan ke empat bidang tersebut dapat menjadi “pintu masuk” dalam membahas dan melaksanakan pembangunan. Bidang komunikasi kiranya merupakan ilmu atau sektor pembangunan yang dapat masuk ke hampir semua sektor pembangunan. Demikian pula jurnalisme, sebagai bidang ilmu maupun jembatan bagi kebijakan pemerintah dan saluran aspirasi publik, memiliki peran strategis antara lain untuk praktek kehumasan. Sedangkan bidang hukum dan bidang sosial juga tidak dapat diabaikan dalam pembangunan secara keseluruhan. Keberhasilan pembangunan bidang ini akan menentukan keberhasilan pembangunan pada umumnya. Sebaliknya, kegagalan di sektor hukum dan sosial akan berdampak sangat fatal.

Selama ini, penulisan para dosen FISIP dan Fakultas Hukum UAJY terkait dengan keempat bidang itu tidak hanya memiliki kualitas pemaparan fakta, data, permasalahan, pembahasan, kesimpulan dan saran, namun juga memiliki “news peg” (cantelan peristiwa) atau aktual. Kalaupun kurang aktual tetap tersaji “ever green”. Isu-isu, fenomena, persoalan apapun yang diangkat dalam tulisan-tulisan opini di koran akan memiliki makna tersendiri, selain tidak sekadar terdengar dan diketahui di lingkup kelas.

Kembali ke soal komitmen, kompetensi dan konsistensi dosen-dosen FISIP dan Fakultas Hukum UAJY dalam mengangkat masalah bersama melalui tulisan di Harian “Bernas Jogja” dan kemudian dibukukan ini jelas merupakan sumbangsih yang layak diapresiasi. Bagi media pers, kehadiran karya tulis akademisi yang berkualitas akan turut mendongkrak kualitas koran bersangkutan. Dalam dinamika kehidupan yang kian kompleks, sumbangan ide, gagasan atau informasi dari kampus akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka.

Akhirnya, kami dari Harian “Bernas Jogja” dan Lembaga Pelatihan Jurnalistik Bernas Jogja (LPJB) mengucapkan terima kasih dan selamat kepada pimpinan FISIP dan Fakultas Hukum UAJY atas kepercayaan, kerjasama dan penerbitan buku “Mozaik Indonesia” ini. Semoga karya bermakna ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi siapa saja untuk melakukan hal yang sama.

Y.B. Margantoro

Redaktur Senior Harian “Bernas Jogja” dan Direktur LPJB

Sekapur Sirih

Buku Mozaik Indonesia: Catatan atas Fenomena Komunikasi, Politik, Sosial, dan Hukum di Indonesia ini berawal dari paguyuban “AyoMenulisFISIP” di lingkungan FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Bekerja sama dengan Harian Bernas Jogja, tulisan para dosen anggota Ayo Menulis FISIP tampil di halaman Opini Bernas Jogja, sejak 13 April 2010, setiap hari Selasa.

Penulisnya adalah dosen-dosen di FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memiliki dua program studi: Ilmu Komunikasi dan Sosiologi. Karena itu, topik atau isu yang hadir pun seputar PR, Iklan, Jurnalisme, dan isu-isu sosial maupun politik. Beruntung, ada dosen Fakultas Hukum yang bergabung, sehingga menambah khazanah/perspektif Hukum.

“AyoMenulisFISIP” mengajak para dosen untuk menyampaikan gagasan atau buah pikirannya dalam bentuk artikel opini. Ini merupakan bagian dari *academic discourse* dan diseminasi ilmu sekaligus mengemban amanah tri dharma perguruan tinggi.

Sistemnya seperti arisan. Setiap penulis yang bergabung akan mendapat jatah atau giliran menulis. Meski belum semua dosen FISIP bergabung, namun rutinitas dan intensitas mereka untuk menulis sejauh ini menunjukkan bahwa gerakan ini cukup masif dan menjadikan aktivitas menulis seperti halnya aktivitas berenang. Awalnya sulit, namun ketika terbiasa akan terasa nikmat, tanpa beban.

Kami pun kami berinisiatif untuk membukukan tulisan-tulisan tersebut. Isinya memang beragam. Kebanyakan menyoroti *current affair* yang pernah menjadi *trending topic*, meski terpisah-pisah.

Buku ini menjadi kumpulan serpihan isu, fenomena, dan persoalan yang mengemuka, kemudian dikumpulkan dan dirajut menjadi sebuah mozaik Indonesia.

Harapan kami, tulisan-tulisan yang terpisah-pisah itu bisa menjadi catatan penting untuk melihat kembali dan berefleksi tentang Indonesia. Bagaimana hasilnya? Sidang pembaca yang akan menilainya.

Salam ayo menulis,

Lukas S. Ispandriarno
Yohanes Widodo
Editor

Media dan Popularitas Soeharto

Bonaventura Satya Bharata

Pertengahan pekan yang lalu, masyarakat mendapatkan kejutan ketika beredar hasil dari sebuah lembaga survei yang menempatkan Soeharto sebagai Presiden yang paling populer dibandingkan dengan lima presiden yang lain. Popularitas ini bahkan melebihi popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang nota bene telah dipilih langsung oleh masyarakat sebanyak dua kali pada Pemilu 2004 dan 2009. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa 36,5% responden menilai mantan Presiden Soeharto merupakan presiden yang paling disukai. Sebanyak 40,5% responden juga menilai bahwa mantan Presiden Soeharto sebagai presiden yang paling berhasil dibanding dengan presiden Indonesia lainnya. Akhirnya yang paling mengejutkan adalah sebanyak 40,9% responden lebih menyukai era Orde Baru dibandingkan dengan era reformasi.

Hasil survei ini pun sontak mengundang reaksi keras. Para aktivis anti Orde Baru bersuara lantang menentang hasil survei ini. Berbagai argumentasi penolakan pun disampaikan. Ditinjau dari sisi metodologis, pemilihan populasi dan sampel responden patut dipertanyakan. Pemilihan responden berdasar usia 17 tahun ke atas bisa jadi memang tidak representatif dipilih untuk menjawab survei yang diberikan. Mengingat pada saat Orde Baru beberapa golongan usia responden ini dinilai masih terlalu kecil atau muda untuk dimintai pendapat yang bersifat membandingkan antara situasi Orde Baru dengan Era Reformasi. Artinya responden golongan usia sekitar 17-25 tahun diyakini belum tentu memahami dengan benar apa yang terjadi di era Orde Baru karena maksimal masih berusia 4-12 tahun. Akan tetapi pihak lembaga survei pun dapat saja berkilah, bahwa responden yang dipilih juga ada yang berusia dewasa pada saat Orde Baru berlangsung, sehingga diyakini sah untuk memberikan jawaban pada kuesioner survei yang diberikan.

Lepas dari perdebatan atau reaksi keras ini, menarik pula disimak mengapa mantan Presiden Soeharto demikian populer di masyarakat Indonesia yang lain, khususnya di luar golongan usia 17-25 tahun. Padahal bisa jadi juga belum tentu masyarakat Indonesia mengenal langsung sosok Soeharto pada saat ia berkuasa. Dalam hal ini haruslah diakui, bagaimana peran besar media membentuk citra positif terhadap sosok Soeharto selama 32 tahun berkuasa. Masyarakat sekarang perlu menyadari, bahwa rejim Soeharto merupakan rejim yang bersifat otoritarian. Dalam rejim otoritarian yang bersifat dominatif (Semma, 2008: 133), peran media lebih bersifat mengabdikan pada kepentingan dia atau mereka yang berkuasa dibandingkan mengabdikan kepada kepentingan publik atau masyarakat. Otomatis semua mekanisme lembaga media, mulai dari perundang-undangan, masalah pembinaan lembaga dan pekerja media (jurnalis), kepemilikan saham, sampai pada pengawasan isi media berada langsung di bawah kooptasi penguasa.

Soeharto adalah sosok yang sadar benar akan kekuatan media dalam membentuk *image*, citra, ataupun reputasi seseorang. Karenanya sejak awal kekuasaannya ia berupaya sedemikian rupa agar media turut serta berpartisipasi untuk melanggengkan kekuasaannya. Semua ini dilakukan dengan berbagai cara. Meminjam istilah Fairclough (1995: 59), dilakukan dengan mengkondisikan tataran *macro* (praktek sosial budaya), *meso* (praktek diskursus), dan *micro* (teks media). Pada skala makro, adalah bagaimana Orde Baru menciptakan atmosfer atau konteks lingkungan yang mampu mengatur ruang gerak kehidupan lembaga media. Misalnya melalui jargon *Pers Pancasila*, *Pers Pembangunan*, *Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab* yang disosialisasikan sedemikian rupa kepada lembaga-lembaga media untuk mengendalikan kekritisian lembaga pers. Dengan jargon-jargon ini diharapkan lembaga pers lebih dapat mempertimbangkan pemberitaan yang dilakukannya, untuk tidak menciptakan instabilitas pada keamanan dan ketertiban nasional. Hal ini dilakukan juga dengan menjadikan TVRI dan RRI sebagai lembaga media massa milik pemerintah melalui Departemen Penerangan, sehingga seluruh *content* siaran yang ditampilkan berupaya untuk memberikan dukungan terhadap Orde Baru.

Pemberian bantuan pemerintah Orde Baru berupa pinjaman lunak kepada beberapa lembaga media pada dasawarsa 1970-an disinyalir juga merupakan bentuk penciptaan ketertundukan lembaga media pada rejim Soeharto. Orde Baru sengaja memberikan kekuatan

ekonomi pada lembaga media, dengan tujuan meminimalkan daya kritis terhadap pemerintah (Sen dan Hill, 2001: 67). Pertama, lembaga media yang bersangkutan tentu menjadi sungkan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah karena menganggap pemerintahlah yang telah membantu secara ekonomi pengembangan usaha lembaga media yang bersangkutan. Kedua, pinjaman lunak inilah yang kemudian mentransformasi beberapa lembaga media atau lembaga pers untuk menjadi korporasi media besar di tanah air. Ketika sebuah lembaga media sudah menjadi mapan secara ekonomi, tentu saja lembaga ini akan berpikir ulang bila ingin melancarkan kritik terhadap pemerintah. Pertaruhannya cukup besar, yakni kehilangan seluruh asset kekayaan karena pembatalan surat izin (SIUPP). Ini tentu menakutkan bagi insan media.

Aspek legalitas atau perundang-undangan pun diatur sedemikian rupa guna menciptakan atmosfer atau konteks lingkungan yang mampu membuat lembaga media menjadi tidak berdaya. Untuk lembaga Pers misalnya UU Pers nomor 21/1982 yang menggantikan UU Pers nomor 11/1966 memang mengatur bahwa pers nasional tidak dikenai sensor dan pembreidelan (pasal 4). Namun dalam kenyataannya, era Orde Baru merupakan era yang terkenal galak dalam hal pemberidelan pers. Tercatat SKH *Prioritas* dan *Sinar Harapan* pada tahun 1986 dan Majalah *Tempo*, Majalah *Editor*, dan Tabloid *Detik* pada tahun 1994 mengalami nasib naas karena dilarang terbit oleh pemerintah Orde Baru. Di masa sebelumnya tercatat SKH *Pedoman* dan *Indonesia Raya* milik wartawan kawakan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis juga mengalami hal yang sama di dasawarsa 1970-an. Walaupun dalam hal ini pemerintah Orde Baru berkilah bukan sedang melakukan pembreidelan, namun hanya melakukan pembatalan SIUPP sebagai manifestasi pembinaan lembaga pers. Ekseksnya sangat manjur, media sangat berhati-hati dalam memberitakan Soeharto dan Orde Baru.

Dalam tataran meso, atau proses produksi teks media, tidak jarang pemerintah Soeharto melakukan intervensi pada proses pemberitaan yang dilakukan oleh lembaga media. Bukan hal asing apabila di era ini dikenal dengan istilah “budaya telepon”. Budaya telepon merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk melakukan penyensoran atau pelarangan penerbitan berita yang sekiranya diprediksi akan mengganggu keamanan dan stabilitas masyarakat. Pemerintah Orde Baru juga sering melakukan intervensi pada pemilihan ketua umum PWI dan menjadikan PWI sebagai satu-

satunya organisasi waratawan yang sah yang diakui oleh pemerintah. Penempatan puteri sulung Soeharto, mbak Tutut sebagai ketua umum PRSSNI di tahun 1980-1990-an yang diikuti dengan adanya aturan bahwa radio siaran swasta tidak boleh menyiarkan berita tentu saja dilakukan dalam rangka mengendalikan lembaga media agar tidak melakukan pembangkangan terhadap kekuasaan Soeharto. Ijin penyelenggaraan lima TV swasta pertama pun (RCTI, SCTV, TPI, ANTV, dan Indosiar) hanya diberikan pada kroni yang ada di lingkaran kekuasaan Soeharto dilakukan dengan tujuan yang sama, pengendalian informasi.

Kooptasi kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto pada seluruh konteks makro dan tataran meso ini tentu saja berakibat pada tataran mikro, yakni isi media. Hampir tiap hari kita dengan mudah menemukan sosok Soeharto di media, terutama di surat kabar dan televisi. Surat kabar dengan “sukrela” memasang foto *headline* Soeharto. Demikian pun televisi. Kebijakan wajib relai siaran berita TVRI di TV swasta kala itu, memudahkan masyarakat bertemu dengan sosok Soeharto. Dan dari semua itu, nyaris tidak pernah kita menemukan cacat pada sosok Soeharto di media. Soeharto selalu ditampilkan sebagai sosok yang berhasil melakukan pembangunan, misalnya foto berita pada saat ia memanen padi atau meresmikan proyek pembangunan bersama Ibu Tien Soeharto. Soeharto selalu ditampilkan sebagai sosok yang ramah pada saat televisi menayangkan dialog pertemuannya dengan para petani melalui Kelompencapir. Soeharto yang selalu serius bila memimpin rapat bidang ekonomi, keuangan, dan industri (ekuin), menerima tamu menteri di Bina Graha, dan menerima tamu negara di Istana Merdeka. Ini masih ditambah Soeharto yang gagah berani memimpin penumpasan G 30 S/PKI dalam film yang diputar setiap 30 September malam atau melawan agresi Belanda pada film *Janur Kuning*.

Sebaliknya, kita tidak pernah menemukan sosok Soeharto yang kecewa karena *microphone* yang tidak berfungsi dengan baik, atau marah menegur gubernur atau menteri yang mengantuk pada saat ia berpidato, atau bahkan sedang mengusir lalat yang mengganggu sambutan kenegaraannya. Ini baru hal-hal kecil yang tidak terlihat. Kita pun tidak akan pernah melihat di media bagaimana kekejaman era Orde Baru di bawah Soeharto pada pembantaian massal pasca tragedi 1965, korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) Orde Baru, dan penghilangan paksa beberapa aktivis pro demokrasi. Semua ini

sudah diatur sedemikian rupa pada tampilan media kita di era Orde Baru. Jika ini yang terjadi, wajarlah bila di mata masyarakat, popularitas Soeharto mampu mengalahkan presiden-presiden yang lain. Menjadi wajar pula bila masyarakat menilai era Orde Baru lebih baik dari era Reformasi. Kooptasi penguasa rejim Orde Baru mampu menjadikan media untuk mewujudkan citra positif mantan Presiden Soeharto dan Orde Baru. []

Sumber Tulisan

- 1 Menyorot Praktik Humas Perusahaan**
Bernas Jogja, 8 Juni 2010
- 2 Amuk Buruh: Diversitas Kultural dan Kompetensi Komunikasi**
Bernas Jogja, 4 Mei 2010
- 3 Strategi Pertahanan Citra SBY**
Bernas Jogja, 22 Maret 2011
- 4 Iklan Susu Formula vs Kampanye ASI**
Bernas Jogja, 31 Agustus 2010
- 5 Sepak Bola Indonesia dan Iklan**
Bernas Jogja, 20 Desember 2010
- 6 Wisata Tani: Belajar dari Maori**
Bernas Jogja, 19 Mei 2011
- 7 Stop Berita Susno!**
- 8 Gagalnya Nalar Jurnalistik Utilitarian**
Bernas Jogja, 20 April 2010
- 9 Empati Media pada Peristiwa Bencana**
Bernas Jogja, 2 November 2010
- 10 Mengapa “Operasi Patuh” Tak Boleh Diliput?**
Bernas Jogja, 10 Agustus 2010
- 11 Pers dan Kejujuran Pejabat Publik**
Bernas Jogja, 5 April 2010
- 12 Korporasi Media dan Kepentingan Publik**
Bernas Jogja, 16 Agustus 2010
- 13 Media dan Popularitas Soeharto**
Bernas Jogja, 24 Mei 2011
- 14 E-Voting: Belajar dari Kabupaten Jembrana**
Bernas Jogja, 13 April 2010
- 15 DPR dan Opini Publik**

Bernas Jogja, 14 September 2010

16 Perjuangan Membentuk Komisi Informasi

Bernas Jogja, 19 Oktober 2010

17 Bencana dan Pembelajaran Bangsa

Bernas Jogja, 9 November 2010

18 Akses Informasi bagi Perempuan Pekerja Migran

Bernas Jogja, 19 Juli 2011

19 Email Komisi VIII DPR

Bernas Jogja, 10 Mei 2011

20 Belajar “Bencana” dari Jepang

Bernas Jogja, 15 Maret 2011

21 Konversi Gas: Pro-Rakyat yang Mencilakakan Rakyat

Bernas Jogja, 20 Juli 2010

22 Di Tengah Kepungan Bisnis Ritel

Bernas Jogja, 18 Mei 2010

23 Skripsi, ‘Mahkota’ Mahasiswa?

Bernas Jogja, 12 Juli 2011

24 Wacana Tubuh dalam Pornografi

Bernas Jogja, 13 Juli 2010

25 Budaya Paksa dan Budaya Amuk

Bernas Jogja, 27 September 2011

26 Aksesibilitas Penyandang Cacat

Bernas Jogja, 21 September 2010

27 Kecelakaan Kereta Api

Bernas Jogja, 12 Oktober 2010

28 Pekerja Kontrak

Bernas Jogja, 14 Juni 2011